

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Asshiddiqie, Jimly. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Auer, Hans, dan M.M.L.B. Willems. *Social Legal Studies: Methodological Perspectives*. Leiden: Brill, 2016.
- Bappenas, "Evaluasi Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia.", 2018.
- Burgess, Michael. *Federalism and the European Union: The Challenge of the Future*. London: Routledge, 2020.
- Darmadi, M. S. dan A. Abdurrahman, "Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah" Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, "Otonomi Daerah: Sejarah, Pelaksanaan, dan Implikasi Kebijakan." Jakarta, 2015.
- Halim, Abdul. *Federalisme dan Otonomi Daerah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. Surabaya: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail, M. I. *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur*. 2020.
- J Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 2.1.

- Kelsen, Hans. *Principles of Constitutional Law*. New York: Lawbook Exchange, 2018.
- M, Howlett, Ramesh, M., & Perl, A, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press, 2009.
- M,Hill, dan Hupe, P. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice* (3rd ed.). SAGE Publications, 2019.
- Martono,Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Ft Rajagrafindo Persada.2010.
- MD,Mahfud. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Michael P Todaro, dan Smith, Stephen C. *Economic Development*. Addison-Wesley, 2009.
- Mustafa.. *Metodologi Penelitian Hukum*. 2024. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2024.
- Nugroho,Sigit Sapto. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman. 2020.
- Riker, William H. *Federalism: Origin, Operation, Significance*. Boston: Little, Brown and Company, 2019.
- Ryaas,Rasyid. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.
- S, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Siswanto,Edy,dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2024.
- Soerjono,Soekanto. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soerjono,Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sun'an,Muammil."Ekonomi Pembangunan Daerah", Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Suratman dan Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syaukani. *Definisi Implementasi* Dzulqarnain et al, 2022.

Tanzeh,Ahmad. Pengantar Metode Penelitian.Yogyakarta: Teras, 2009.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq,dkk. Ragam Metode Penelitian Hukum, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Wijaya,Hengki dan Umrati.Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan.Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.2020.

2. Jurnal

D, Mardapi. "Pengukuran Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif." Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 20, no. 1 (2016).

Faguet, Jean-Paul. Decentralization and Popular Democracy: Governance from Below in Bolivia. University of Michigan Press, 2021.

Faisal,"Analisis Implementasi kebijakan otonomi daerah", jurnal Ilmu Administrasi, Vol.x.No.2 (Desember 2013).

Ismail,Gusnar. "Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19." Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 8, no. 3 (2022).

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. University of California Press, 2017.

Lambelanova,Rossy. "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat". Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli, 017.

Lijphart,Arendt. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press, 2012.

Majida,Fajri dan Ketut Dewi Martha Erli Handayeni.Tipologi Ketertinggalan Wilayah pada Kabupaten Sampang, JURNAL PENATAAN RUANG Vol. 14, No. 1, ISSN: 2716-179X (1907-4972 Print), 2019.

Misnaniarti, Peni. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal: Analisis dan Implementasi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1), 2016.

Prasojo, Eko. "Dampak Implementasi Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Tinjauan Kritis." *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, 2020.

Qodari, M. "Otonomi dan Desentralisasi: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintahan Lokal di Indonesia," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 16, no. 1, 2012.

S, Sukardi. "Metodologi Penelitian Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* . 2020.

Triani, Mike. "Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN "SNEMA-, ISBN:978-602-17129-5-5, 2015.

3. Skripsi

Wahla, Rianti. Implementasi kebijakan otonomi khusus di kota jayapura. *Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2023.

4. Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang Tahun 2023," BRS No. 1/02/3527/Th.V, 29 Februari 2024.

Kebijakan Otonomi Daerah," dalam Dokumen Kebijakan Pemerintahan, 2017.

Peraturan Bupati Kabupaten Sampang No. 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2024-2026. Sampang: Pemerintah Kabupaten Sampang, 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Website

Website resmi kabupaten sampang. “Gambaran Umum”. <https://sampangkab.go.id/Gambaran-Umum>, diakses 06 maret 2022. 14.31 WIB.

Website resmi kabupaten sampang. “Visi dan Misi”. <https://sampangkab.go.id/Visi-Misi>. diakses 05 Maret 2022. 14.35 WIB.

Admin bappeda, “Pembangunan Ekonomi”, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-13>, di akses 10 Mei (2017). 13.00 WIB.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur” Jatim Resmi Terbebas dari Daerah Tertinggal” <https://dpmd.jatimprov.go.id/component/content/article/90-berita/1248-jatim-resmi-terbebas-dari-daerah-tertinggal>, di akses tanggal, 1 Agustus 2013. 15.58 WIB.

Umam, Khairul,” Tahun 2024, Sampang Masih Termiskin di Jatim” <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/518379/tahun-2024-sampang-masih-termiskin-di-jatim>, di akses tanggal 16 Januari 2024. 03.00 WIB.